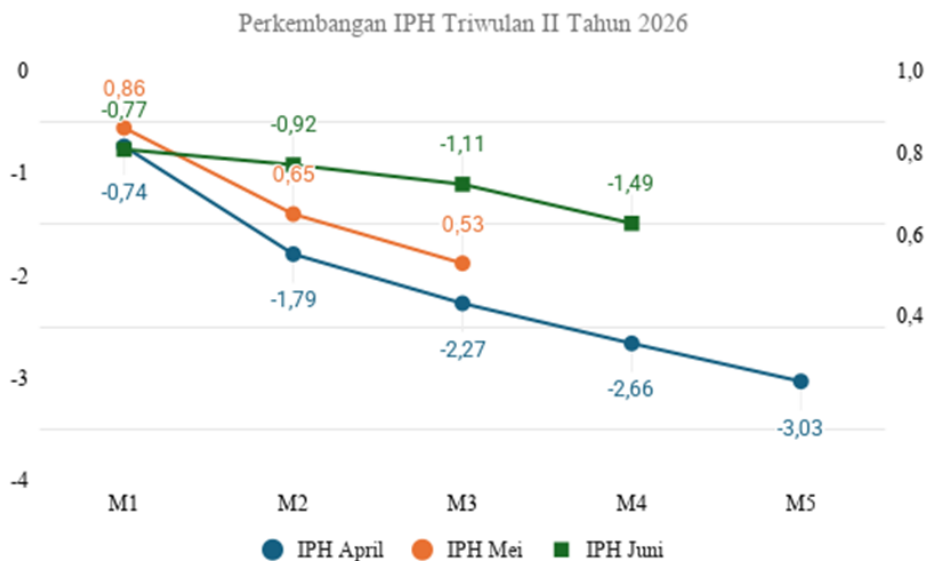


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Bantul merupakan daerah non-Indeks Harga Konsumen (non-IHK), sehingga tingkat inflasi daerah tidak dihitung secara langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sebagai indikator untuk memantau perkembangan harga di daerah, Kabupaten Bantul menggunakan Indikator Perkembangan Harga (IPH) yang disusun berdasarkan pergerakan harga sejumlah komoditas strategis. Melalui IPH, Pemerintah Kabupaten Bantul dapat memantau dinamika harga secara berkala sebagai dasar dalam merumuskan langkah-langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan di daerah.



Sumber: BPS 2026, data diolah

Berdasarkan grafik Perkembangan IPH Triwulan II Tahun 2026, terjadi perubahan tren harga yang cukup signifikan. Pada bulan April, IPH menunjukkan tren penurunan secara bertahap dari -0,74 pada Minggu I; -1,79 pada Minggu II; -2,27 pada Minggu III; -2,66 pada Minggu IV; dan -3,03 pada Minggu V yang mengindikasikan terjadinya deflasi atau penurunan harga komoditas pangan secara berkelanjutan selama bulan tersebut.

Memasuki bulan Mei, kondisi berbalik arah. Pada Minggu I Mei, IPH tercatat 0,86; kemudian menurun menjadi 0,65 pada Minggu II dan 0,53 pada Minggu III. Meskipun mengalami penurunan nilai dari minggu ke minggu, IPH masih berada pada zona positif yang menunjukkan harga pangan secara umum mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya.

Memasuki bulan Juni, kondisi IPH kembali berada pada zona negatif dengan tren yang menurun secara bertahap setiap minggunya. Nilai IPH tercatat sebesar -0,77 pada Minggu I Juni; -0,92 pada Minggu II Juni; -1,11 pada Minggu III Juni; dan -1,49 pada Minggu IV Juni. Tren penurunan ini menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan mengalami penurunan dibandingkan pada periode sebelumnya.

Selain itu, perkembangan Harga Bahan Pokok pada triwulan II 2026 sebagai berikut:

1. Komoditas yang mengalami kenaikan harga

Komoditas	Harga/kg/liter			Harga Acuan Penjualan (HAP)
	April	Mei	Juni	
Bawang Merah	Rp 40.353	Rp 44.062	Rp 49.924	Rp 36.500 – 41.500
Bawang Putih Sinco	Rp 31.290	Rp 31.183	Rp 35.121	Rp 38.000

Sumber: DKUKMPP 2026, data diolah

Berdasarkan hasil pemantauan pada tabel di atas, kenaikan harga mulai terjadi pada bulan April dan mencapai puncaknya pada bulan Juni bahkan untuk bawang merah sudah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen. Periode tersebut bertepatan dengan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1447 H serta menjelang masa libur sekolah yang secara umum mendorong peningkatan permintaan masyarakat. Selain dipengaruhi oleh peningkatan permintaan, berkurangnya produksi akibat faktor cuaca, serta fluktuasi harga internasional dan nilai tukar juga turut memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan harga pangan.

2. Komoditas yang mengalami penurunan harga

Komoditas	Harga/kg/liter			Harga Acuan Penjualan (HAP)
	April	Mei	Juni	
Telur Ayam Ras	Rp 27.589	Rp 25.858	Rp 25.393	Rp 30.000
Daging Ayam Ras	Rp 34.649	Rp 32.998	Rp 30.362	Rp 40.000

Sumber: DKUKMPP 2026, data diolah

Berdasarkan hasil pemantauan pada tabel di atas, sepanjang Triwulan II Tahun 2026 komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras menunjukkan tren penurunan harga. Penurunan harga tersebut didukung oleh terjaganya ketersediaan pasokan, antara lain melalui kegiatan penetasan telur yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan realisasi sebanyak 9.750 butir selama Triwulan II Tahun 2026. Kondisi pasokan yang relatif mencukupi turut menjaga ketersediaan kedua komoditas di pasar. Di sisi lain, penurunan harga juga dipengaruhi oleh melemahnya permintaan. Memasuki masa libur sekolah, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut berhenti sementara, sehingga kebutuhan terhadap komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras mengalami penurunan. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan yang tersedia tidak sepenuhnya terserap oleh pasar, sehingga terjadi kelebihan stok di tingkat pedagang yang pada akhirnya mendorong penurunan harga kedua komoditas tersebut.

3. Komoditas dengan harga fluktuatif

Komoditas	Harga/kg/liter			Harga Acuan Penjualan (HAP)
	April	Mei	Juni	
Cabai Merah Keriting	Rp 35.542	Rp 43.031	Rp 37.315	Rp 37.000-55.000
Cabai Rawit Merah	Rp 60.681	Rp 69.348	Rp 58.860	Rp 40.000-57.000
Bawang Putih Kating	Rp 34.104	Rp 33.980	Rp 37.987	Rp 38.000

Sumber: DKUKMPP 2026, data diolah

Berdasarkan hasil pemantauan harga pada Triwulan II Tahun 2026, beberapa komoditas hortikultura mengalami fluktuasi harga yang cukup signifikan. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas cabai rawit merah dan cabai merah keriting yang telah melebihi HAP. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan pasokan di tingkat pasar belum sepenuhnya mampu mengimbangi permintaan masyarakat, sehingga harga komoditas hortikultura khususnya cabai menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi. Selain dipengaruhi oleh dinamika pasokan, pergerakan harga juga dipengaruhi oleh faktor musiman, kondisi cuaca, preferensi petani, dan pola distribusi sehingga diperlukan upaya penguatan pasokan dan kelancaran distribusi untuk menjaga stabilitas harga.

4. Komoditas dengan harga cenderung stabil

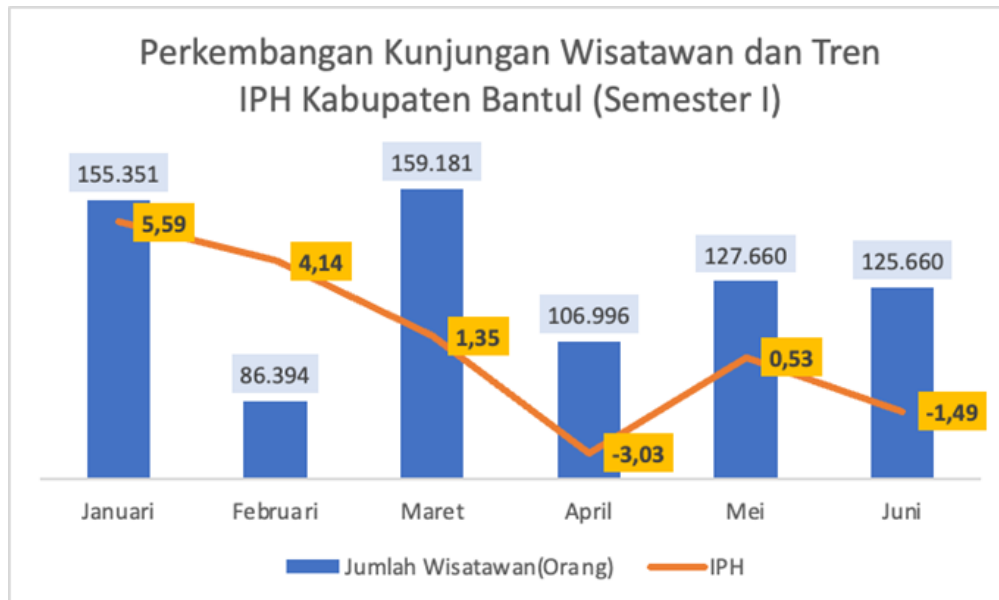
Komoditas	Harga/kg/liter			Harga Acuan Penjualan (HAP)
	April	Mei	Juni	
Beras	Rp 12.929	Rp 12.975	Rp 13.025	Rp 13.500
Minyakita	Rp 15.633	Rp 15.587	Rp 15.538	Rp 15.700
Gula Pasir	Rp 17.532	Rp 17.255	Rp 17.035	Rp 17.500
Daging Sapi	Rp 146.533	Rp 146.000	Rp 146.625	Rp 140.000

Sumber: DKUKMPP 2026, data diolah

Berdasarkan hasil pemantauan pada Triwulan II Tahun 2026, harga sebagian besar komoditas pangan strategis di Kabupaten Bantul relatif stabil dan masih berada dalam rentang HAP. Khusus pada komoditas daging sapi, terjadi penyesuaian harga sebesar Rp10.000/kg sebagai tindak lanjut atas kesepakatan pedagang daging di Segoroyoso, sehingga harga jual daging sapi di Kabupaten Bantul menjadi Rp150.000/kg. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya harga sapi hidup serta kenaikan biaya operasional, seperti transportasi, pemotongan, dan distribusi. Mengingat Segoroyoso merupakan salah satu sentra perdagangan daging sapi di Kabupaten Bantul, perubahan harga di tingkat pedagang tersebut berdampak pada penyesuaian harga jual di pasar tradisional. Selain itu, keterbatasan pasokan sapi potong dibandingkan permintaan turut memperkuat tren kenaikan harga daging sapi di tingkat konsumen. Meskipun terjadi penyesuaian, perkembangan harga daging sapi selama triwulan II masih berada pada kisaran harga yang telah disepakati dan tidak menunjukkan fluktuasi yang signifikan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1447 H dan menjelang masa libur sekolah mendorong peningkatan permintaan masyarakat terhadap berbagai komoditas pangan strategis. Peningkatan permintaan tersebut memberikan tekanan pada harga, terutama untuk komoditas hortikultura seperti cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, dan bawang putih.



sumber: BPS, Dinas Pariwisata, data diolah

Berdasarkan grafik di atas, pada bulan Januari gelombang wisatawan selama libur Tahun Baru mendongkrak konsumsi kuliner, jasa akomodasi, dan produk oleh-oleh di Bantul. Lonjakan permintaan mendadak ini mendesak *aggregate demand* ke kanan melebihi kapasitas penawaran jangka pendek, memicu *Demand-Pull Inflation*. Meskipun wisatawan turun tajam pada Februari (*low season*), IPH tidak langsung merosot drastis. Ini mengindikasikan adanya *stickiness of prices* (kekakuan harga) serta pengaruh pasokan komoditas pangan bergejolak (*volatile food*) nasional yang belum panen di awal tahun. Selain itu hilangnya kebijakan diskon tarif listrik yang sempat ada pada Januari-Februari 2025 juga menciptakan *low-base effect*. Memasuki bulan Maret hingga April Tahun 2026 merupakan periode puncak panen raya padi dan hortikultura di wilayah Jawa termasuk DIY dan Kabupaten Bantul. Melimpahnya pasokan di tingkat produsen menggeser kurva *Aggregate Supply* ke kanan. Hukum Penawaran memicu penurunan harga pasar secara signifikan, meredam tekanan harga dari melonjaknya turis pada bulan Maret.

Pada bulan April Tahun 2026 identik dengan periode Idul Fitri. Deflasi sebesar **-3,03%** menandakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bantul bersama BULOG berhasil melakukan mitigasi lonjakan harga lewat program Operasi Pasar, Gelar Pangan Murah (GPM). Sedangkan pada bulan Mei hingga Juni Tahun 2026 terjadi titik temu yang sehat (*equilibrium*). Sektor pariwisata berjalan tinggi dan konsisten (menyerap ekonomi lokal), namun pasar bahan pokok tidak bergejolak. Pengendalian inflasi berbasis 4K+1 (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif, dan Kolaborasi) berhasil mengunci ekspektasi harga masyarakat dan spekulasi pedagang.

2. Cuaca

Kenaikan harga cabai dan bawang merah pada Triwulan II Tahun 2026 dipengaruhi oleh kondisi cuaca ekstrim yang berlangsung di sejumlah daerah sentra produksi. Berkurangnya ketersediaan air untuk irigasi berdampak pada penurunan produktivitas tanaman. Di beberapa daerah juga turut terkena serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Di Kabupaten Bantul sendiri, serangan OPT masih berada pada tingkat yang terkendali dan belum menimbulkan kerusakan yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan maupun

produktivitas tanaman. Oleh karena itu, kenaikan harga yang terjadi lebih dipengaruhi oleh dinamika pasokan dari daerah sentra produksi dan peningkatan permintaan terutama menjelang dan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1447 H.

3. Preferensi Petani

Preferensi dan kemampuan adaptasi petani dalam pengambilan keputusan usaha tani menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengantisipasi risiko produksi, termasuk potensi gagal panen. Salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan adalah pengalihan pola tanam dari komoditas hortikultura ke tanaman padi. Penggunaan varietas padi yang tahan kering seperti Inpari 32 dan Inpari 42 dinilai memiliki tingkat risiko gagal panen lebih rendah serta prospek hasil yang lebih stabil. Keputusan tersebut mencerminkan upaya petani dalam meminimalkan risiko kerugian sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani sesuai dengan kondisi dan prospek pasar.

4. Geopolitik Global

Ketegangan geopolitik global berpotensi mempengaruhi stabilitas harga pangan melalui peningkatan harga energi dan biaya logistik internasional. Kenaikan biaya impor tersebut berdampak pada komoditas yang masih bergantung pada pasokan luar negeri, seperti bawang putih yang sekitar 95% kebutuhan nasional dipenuhi dari impor. Selain itu pada awal Triwulan II tahun 2026 pelaku usaha juga menghadapi kenaikan harga plastik kemasan antara 40% hingga 80%, yang dipengaruhi krisis pasokan nafta global. Oleh karena itu, perkembangan kondisi geopolitik global perlu terus dicermati sebagai salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi stabilitas harga pangan daerah.

5. Kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap Rupiah

Secara umum, pelemahan rupiah telah mendorong *imported inflation*, yaitu inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang dan jasa akibat meningkatnya biaya impor. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan biaya antara lain bahan baku, pakan ternak, obat-obatan, pupuk, dan komoditas pangan yang masih bergantung pada pasokan luar negeri. Kenaikan nilai tukar juga meningkatkan biaya logistik dan transportasi sehingga mendorong penyesuaian harga pada berbagai komoditas pangan di tingkat konsumen.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Tahun 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bantul menetapkan **GEPLAK BANTUL (Gerakan Pangan Lokal dan Akses Ketersediaan Bahan Pokok Antarwilayah untuk Laju Inflasi Terkendali)** sebagai program unggulan dalam mendukung pengendalian inflasi daerah. Program ini menjadi instrumen operasional dalam implementasi strategi **4K+1**. Melalui GEPLAK BANTUL, TPID Kabupaten Bantul berupaya memperkuat ketahanan pangan daerah serta menjaga stabilitas harga bahan pokok secara berkelanjutan.

◦ **Program Stabilisasi Pasokan Dengan Peningkatan Produktivitas:**

1. Ketersediaan Pasokan

Sepanjang Triwulan II Tahun 2026, TPID telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung ketersediaan pasokan komoditas strategis, antara lain sebagai berikut:

Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Secara Berkala ke Kelompok Ternak, Pelaku Usaha Peternakan, RPH, dan Pasar Rakyat sebanyak 12 kali dengan total dukungan anggaran APBD sebesar Rp 35.000.000.

- Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) Kambing dilaksanakan sebanyak 257 dosis straw. Pelaksanaan kegiatan ini didukung melalui anggaran APBD dengan total realisasi sebesar Rp 87.514.800.
- Pelaksanaan penetasan (ayam) sebanyak 9.750 butir telur dengan hasil 12.948 *Day Old Chick (DOC)*. Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh anggaran APBD dengan total realisasi sebesar Rp 30.000.000.
- Pelaksanaan Vaksinasi sebanyak 3.423 dosis vaksin untuk pencegahan penyakit hewan menular dengan dukungan APBD sebesar . Pelaksanaan vaksin tersebut telah menysasar 1.309 ekor sapi, 544 ekor kambing, dan 1.362 ekor domba.
- Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebanyak 18 kali ke Kelompok Tani (KT) dengan total dukungan anggaran APBD sebesar Rp 15.750.000.
- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani/Gapoktan dengan dukungan anggaran APBD sebesar Rp 14.359.000.
- Sosialisasi Pengenalan Budidaya Pertanian di 6 Sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bantul.
- Pemberian Bantuan Alat Mesin Pertanian berupa hand sprayer 1 unit, rice transplanter 1 unit, power thresher 10 unit dan sarana pascapanen tembakau 6 paket kepada Gapoktan.
- Pemberian bantuan benih padi sebanyak 204.725 kilogram yang tersebar kepada 631 kelompok tani untuk lahan pertanian seluas 8.189 hektar.
- Pemberian bantuan benih jagung sebanyak 101.200 kilogram untuk lahan seluas 4.048 hektar yang tersebar di 287 kelompok tani, serta bantuan benih jagung hasil kerja sama dengan POLRI sebanyak 4.110 kilogram.
- Pelatihan dan Pemberian Benih dan Bibit ke Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga.
- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan melalui Sosialisasi Gemarikan, Gemarikan Goes to School, pertemuan rutin poklamsar sebanyak 11 kali dengan dukungan anggaran APBD sebesar Rp 80.700.000.
- Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan Dan Usaha Pengangkutan Ikan melalui sosialisasi pelestarian ikan dan penebaran benih ikan di perairan umum sebanyak 5 kali ke kelompok masyarakat pengawas perikanan dengan dukungan anggaran APBD sebesar Rp 35.000.000.
- Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Budidaya melalui Bimtek hama dan penyakit hewan sebanyak 30 kali ke kelompok pembudidaya ikan dengan dukungan anggaran APBD sebesar Rp 8.500.000.
- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan melalui sosialisasi dan pelatihan sebanyak 9 kali ke kelompok pembudidaya ikan dengan dukungan anggaran APBD sebesar Rp 180.000.000.
- Sosialisasi dan penebaran benih ikan bersama pelajar sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pelestarian sumber daya perikanan. Kegiatan tersebut didukung dengan anggaran APBD sebesar Rp 10.000.000.
- Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, gali sedimen, babat rumput dengan dukungan anggaran APBD sebesar Rp 697.634.590. Adapun target rehabilitasi jaringan irigasi permukaan yaitu 5,5 km.
-

Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dengan dukungan anggaran APBD sebesar Rp 938.796.660 yang saat ini masih dalam proses pemilihan penyedia. Adapun target pemeliharaan jaringan irigasi permukaan yaitu 6 km.

- **Program Hilirisasi Dan Efisiensi Rantai Pasok Komoditas:**

1. Keterjangkauan Harga

Sepanjang Triwulan II Tahun 2026, TPID telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung keterjangkauan harga pangan strategis, diantaranya yaitu :

- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah melaksanakan kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok serta barang penting secara rutin pada setiap hari kerja di 5 (lima) pasar pantauan, yaitu Pasar Bantul, Pasar Pijenan, Pasar Niten, Pasar Imogiri, dan Pasar Piyungan. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pemantauan perkembangan harga dan ketersediaan stok komoditas strategis guna mendukung pengendalian inflasi daerah serta menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
- Selain pemantauan di tingkat pasar, pemantauan harga dan stok juga dilaksanakan di tingkat distributor sebanyak 3 (tiga) kali selama periode triwulan sebagai langkah untuk memastikan kelancaran distribusi dan kecukupan pasokan dari sisi hulu. Pelaksanaan kegiatan ini didukung melalui anggaran APBD dengan total realisasi sebesar Rp 5.700.000.
- Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar (OP) di pasar pantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia serta pasar pantauan Kabupaten Bantul sebanyak 3 kali. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah intervensi untuk menjaga keterjangkauan harga dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis di tingkat masyarakat, khususnya pada periode meningkatnya permintaan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga komoditas pangan menjelang hari raya. Pelaksanaan kegiatan operasi pasar didukung melalui anggaran APBD dengan total realisasi sebesar Rp 525.000 Selain dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, kegiatan operasi pasar juga dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Daerah DIY yang telah dilaksanakan sebanyak 4 kali.
- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan serta memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1447 H telah dilaksanakan sebanyak 1 kali di Lapangan Ringinharjo. Kegiatan ini didukung anggaran APBD sebesar Rp10.890.000 yang dimanfaatkan untuk memberikan subsidi biaya angkut kepada distributor, sehingga komoditas pangan dapat dijual kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk serta pestisida bersubsidi pada 9 kios pengecer pupuk bersubsidi di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta mendukung ketersediaan sarana produksi pertanian guna menjaga produktivitas sektor pertanian dan mendukung stabilitas pasokan pangan di Kabupaten Bantul yang didukung dengan anggaran APBD sebesar Rp 2.690.000.
- Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Ikan telah dilaksanakan sebanyak 3 kali kepada kelompok pengolah ikan sebagai upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha sekaligus mendorong diversifikasi produk olahan perikanan yang bernilai tambah. Kegiatan ini didukung melalui APBD dengan anggaran sebesar Rp36.000.000.

2. Kelancaran Distribusi

Sepanjang Triwulan II Tahun 2026, TPID telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung kelancaran distribusi sebagai upaya peningkatan konektivitas wilayah, kelancaran mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi daerah, diantaranya yaitu:

- Kegiatan rehabilitasi jembatan dengan target 9,6 unit, rehabilitasi jalan sepanjang 58,5 km, dan pemeliharaan jalan sepanjang 20 km hingga Triwulan II Tahun 2026 masih berada pada tahap pemilihan penyedia. Pelaksanaan kegiatan tersebut didukung melalui APBD dengan total alokasi anggaran sebesar Rp60.365.326.
- Pelaksanaan inspeksi keselamatan pada daerah rawan kecelakaan di sembilan titik lokasi, yaitu Simpang Empat Sedayu-SLB Helen Keller, Perlintasan JPL 714-Tugu Perbatasan Sleman, Jalan Kemusuk (Perbatasan Sleman)-Pasar Menulis, Simpang Empat Pedes-SMA Negeri 1 Sedayu, SMA Negeri 1 Sedayu-Kemusuk Lor, serta Pintu Perlintasan Nomor 706, 707, 708, dan 711. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi potensi risiko keselamatan lalu lintas, meningkatkan keamanan dan kelancaran arus transportasi, serta meminimalkan hambatan distribusi barang dan mobilitas masyarakat yang didukung oleh APBD sebesar Rp1.750.000.
- Pelaksanaan kegiatan pembelian dan perawatan suku cadang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada 18 titik lokasi selama Semester I Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan menjaga fungsi dan keandalan APILL agar tetap beroperasi secara optimal dalam mengatur arus kendaraan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta mengurangi potensi kemacetan pada ruas-ruas strategis. Kegiatan tersebut didukung oleh APBD sebesar Rp 3.750.000.
- Pelaksanaan kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan selama Semester I Tahun 2026. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan terdapat 76 pelanggaran kendaraan dengan KIR yang telah habis masa berlaku. Penegakan hukum ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban uji berkala, memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, serta mendukung keselamatan transportasi. Kegiatan tersebut didukung oleh APBD sebesar Rp 12.220.000.

3. Komunikasi Efektif

Sepanjang Triwulan II Tahun 2026, TPID telah melaksanakan kegiatan komunikasi efektif serta diseminasi informasi, diantaranya yaitu:

- Penyelenggaraan rapat koordinasi sebanyak tiga kali untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan harga komoditas strategis serta merumuskan langkah-langkah stabilisasi harga yang diperlukan. Selain itu, dilakukan pemantauan hewan kurban dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok sebanyak satu kali menjelang HBKN Idul Adha 1447 H guna memastikan kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, serta mengantisipasi potensi gejolak harga di masyarakat. Pada periode yang sama juga dilaksanakan *capacity building* dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antar daerah sebagai upaya memperkuat ketahanan pasokan pangan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut didukung melalui APBD dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 4.800.000.
- Pembaruan (*updating*) perkembangan harga kebutuhan pokok melalui website dan aplikasi Bantulpedia telah dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali.
- Peliputan dan publikasi telah dilaksanakan sebanyak 4 kali, yaitu pada kegiatan budidaya melon, TPR, koperasi desa dan peninjauan kecukupan kesehatan sapi qurban.

Kegiatan tersebut telah didukung oleh anggaran APBD sebesar Rp 10.000.000.

- Diseminasi informasi melalui media elektronik/radio sebagai sarana edukasi kepada masyarakat mengenai perilaku belanja bijak serta kewaspadaan di era *cashless* juga telah dilaksanakan sebanyak 20 (dua puluh) kali siar, dengan dukungan anggaran APBD sebesar Rp 1.000.000.
- Penerbitan Surat Edaran Bupati Bantul Nomor B/100.3.4/00571 tentang Antisipasi Dampak Kemarau di Kabupaten Bantul.
- Pemerintah Kabupaten Bantul bersama TVRI melaksanakan koordinasi penyelenggaraan nonton bareng (nobar) Piala Dunia FIFA 2026 sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini bertujuan mendukung kelancaran penyelenggaraan nobar di ruang publik sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui peningkatan aktivitas UMKM. Pemerintah juga melakukan pendataan lokasi nobar sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan guna memastikan penyelenggaraan berjalan tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi perekonomian daerah.

4. Kolaborasi

- Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Bank Indonesia DIY

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok, Pemerintah Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Pasar Murah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1447 H di Kapanewon Dlingo. Kegiatan ini bertujuan menyediakan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia DIY memberikan dukungan berupa subsidi biaya angkut kepada distributor yang berpartisipasi, sehingga harga jual bahan pangan kepada masyarakat dapat ditekan. Pelaksanaan pasar murah didukung melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank Indonesia (BI) DIY dengan total anggaran sebesar Rp 13.261.500.

- Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Kepolisian Resor Bantul

Pemerintah Kabupaten Bantul berkolaborasi dengan Kepolisian Resor Bantul melaksanakan kegiatan Panen Jagung Serentak Kuartal II di Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional sebagaimana menjadi salah satu prioritas dalam Asta Cita Presiden. Panen dilaksanakan pada lahan jagung non-Lahan Baku Sawah (non-LBS) binaan Polri dengan luas panen mencapai 0,35 hektare. Berdasarkan hasil ubinan, produktivitas jagung tercatat sebesar 8,11 ton per hektare, sehingga dari luas lahan yang dipanen diperoleh hasil produksi sekitar 2,83 ton jagung. Pelaksanaan panen jagung serentak tersebut mencerminkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kepolisian Resor Bantul dalam mendukung peningkatan produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta menjaga ketersediaan pasokan pangan yang berkelanjutan.

- Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Komando Distrik Militer 0729/Bantul

Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap II Tahun 2026 telah selesai dilaksanakan di Dusun Tangkil, Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo yang bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan wilayah, kelancaran mobilitas masyarakat, memperlancar akses terhadap kegiatan ekonomi, serta meningkatkan konektivitas wilayah, sehingga memberikan dampak positif terhadap pemerataan pembangunan dan kesejahteraan

masyarakat di Kabupaten Bantul. Kegiatan fisik yang dilaksanakan meliputi pembangunan dua unit mandi, cuci, kakus (MCK), pembangunan jembatan, serta pengecoran jalan. Selain pembangunan fisik, TMMD juga diisi dengan berbagai kegiatan non fisik berupa penyuluhan kepada masyarakat yang mencakup wawasan kebangsaan dan bela negara, penyuluhan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pencegahan kejahatan jalanan dan judi daring, pencegahan stunting, penguatan layanan Posyandu dan Posbindu, serta peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat.

- Pemerintah Kabupaten Bantul berkolaborasi dengan Yayasan Swatantra Pangan Nusantara (YSPN)

Pemerintah Kabupaten Bantul bersama Yayasan Swatantra Pangan Nusantara (YSPN) melaksanakan panen bersama dan pemantauan demplot di Kalurahan Poncosari sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penerapan benih unggul, teknologi budidaya, dan pendampingan petani mampu meningkatkan produktivitas padi hingga sekitar 8 ton per hektare, bahkan demplot YSPN diproyeksikan mencapai 11,6 ton per hektare. Peningkatan produktivitas tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan pasokan pangan serta mendukung stabilitas harga di Kabupaten Bantul.

- Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Yayasan Global Saemaul Indonesia (YGSI)

Dalam rangka mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pemerintah Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Yayasan Global Saemaul Indonesia (YGSI) dalam penguatan subsektor perikanan melalui pemberian subsidi pakan ikan kepada pembudidaya. Dalam pelaksanaannya, YGSI memberikan subsidi sebesar 50% dari harga pembelian pakan ikan bagi pembudidaya di Kampung Gurami, Kalurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek. Dukungan tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas budidaya ikan, memperkuat ketersediaan pasokan ikan, serta mendukung stabilitas harga pangan di Kabupaten Bantul.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Ketersediaan Pasokan

Pemerintah Kabupaten Bantul terus memperkuat sektor hulu melalui pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), pengembangan subsektor peternakan dan perikanan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, serta pemanfaatan teknologi pertanian maupun perikanan. Kebijakan tersebut dinilai mampu mendukung peningkatan produktivitas, menjaga keberlanjutan produksi, dan memperkuat ketersediaan pasokan pangan daerah.

2. Keterjangkauan Harga

Kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan secara rutin di pasar pantauan serta distributor telah berjalan efektif sebagai instrumen *early warning system* terhadap potensi gejolak harga. Selain itu, pelaksanaan operasi pasar, pasar murah, dan Gerakan Pangan Murah menjelang HBKN Idul Adha 1447 H telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Meskipun demikian, intensitas intervensi harga masih perlu ditingkatkan, khususnya pada komoditas pangan strategis yang mengalami volatilitas tinggi.

3. Kelancaran Distribusi

Kebijakan rehabilitasi jalan, pemeliharaan rutin jalan, serta rehabilitasi jembatan, diharapkan mampu mendukung konektivitas wilayah dan kelancaran distribusi barang, khususnya komoditas pangan dari sentra produksi menuju pasar konsumen. Kebijakan ini dinilai strategis dalam menekan biaya logistik dan meminimalkan potensi gangguan distribusi, terutama pada periode permintaan tinggi.

4. Komunikasi Efektif

Pelaksanaan rapat koordinasi, *capacity building* tim TPID, pemantauan harga dan ketersediaan pasokan jelang HBKN Idul Adha 1447 H, pembaruan data harga melalui Bantulpedia, publikasi media, serta diseminasi informasi melalui radio maupun sosial media lainnya telah berjalan dengan baik dalam membangun ekspektasi masyarakat terhadap stabilitas harga dan meningkatkan literasi publik mengenai perilaku konsumsi yang bijak.

5. Kolaborasi

Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Bank Indonesia, Kepolisian Resor Bantul, Komando Distrik Militer (Kodim) 0729/Bantul, Yayasan Global Saemaul Indonesia (YGSI), Yayasan Swatantra Pangan Nusantara (YSPN), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya telah memperkuat upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kabupaten Bantul. Sinergi tersebut diwujudkan melalui penguatan sektor hulu hingga hilir, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, pengembangan ketahanan pangan, serta dukungan terhadap kelancaran distribusi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Penguatan ketersediaan pasokan melalui peningkatan dukungan terhadap produksi komoditas pangan strategis, khususnya komoditas *volatile food* seperti cabai, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penguatan sektor hulu, meliputi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, pengembangan subsektor peternakan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kabupaten Bantul. Mengingat Triwulan III bertepatan dengan musim kemarau, perlu dilakukan antisipasi terhadap potensi kekeringan melalui optimalisasi jaringan irigasi dan pompanisasi untuk menjaga produktivitas pertanian.
2. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan pasar murah perlu ditingkatkan frekuensinya, terutama pada wilayah yang mengalami kenaikan harga tinggi dan pada periode meningkatnya permintaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga perlu didukung melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan efektivitas stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kabupaten Bantul.
3. Peningkatan kelancaran distribusi melalui prioritas pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan yang mendukung akses dari sentra produksi ke pasar distribusi utama, termasuk penguatan koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi hambatan distribusi akibat cuaca ekstrem atau gangguan logistik. Kerja Sama Antar Daerah (KAD) perlu terus diperluas dengan daerah penghasil komoditas strategis untuk menjamin kontinuitas pasokan, khususnya sapi hidup, cabai, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Penguatan komunikasi publik dan edukasi masyarakat perlu terus dioptimalkan melalui

4.

pemanfaatan berbagai kanal informasi resmi Pemerintah Kabupaten Bantul, seperti website, aplikasi Bantulpedia, media sosial, radio, dan publikasi di media massa. Upaya ini bertujuan meningkatkan transparansi informasi perkembangan harga dan ketersediaan pangan, mendorong pola konsumsi yang bijak, serta menyosialisasikan berbagai program dan kegiatan yang mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kabupaten Bantul.

5. Mitigasi dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi meningkatkan biaya impor komoditas dan input produksi, TPID perlu memperkuat pemantauan harga komoditas yang memiliki ketergantungan terhadap impor, seperti bawang putih, kedelai, pupuk, obat, serta bahan baku pakan ternak. Selain itu perlu didorong peningkatan penggunaan komoditas lokal sebagai bahan baku guna mengurangi tekanan *imported inflation*.

6. Penguatan sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan perlu terus ditingkatkan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, instansi vertikal, Bank Indonesia, Perum Bulog, BUMD, sektor swasta, pelaku usaha distribusi pangan, serta mitra strategis lainnya. Kolaborasi tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, memperlancar distribusi komoditas pangan strategis, serta memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kabupaten Bantul.